



# LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA



---

## KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA

Jalan Pangkalan Muntai KM. 5 Kel. Kotawaringin Hulu Kode Pos 74161

Telp : (0532) 2072001 email : [keckotawaringinlama@gmail.com](mailto:keckotawaringinlama@gmail.com)

**KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran 2022 dan merupakan evaluasi pelaksanaan kinerja bidang pemerintahan umum di Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan ke depan.

Demikian laporan ini dibuat semoga bermanfaat dan kepada semua pihak yang turut membantu penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA,



**N A H W A N I, S.IP**

NIP. 19660306 198712 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	99	90,81	91,73	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Nilai Indeks Pembangunan Kelurahan	> 70	77,46	110,66	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Persentase	100 %	100 %	100,00	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah 100,79 % dengan peringkat kinerja **Sangat Tinggi**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi, sementara ketersediaan sumber daya, khususnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki kecamatan masih sangat terbatas,
- b. Ketersediaan jaringan internet perkantoran sampai saat ini belum stabil karena masih menggunakan pemancar radio, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.
- c. Status Kawasan Hutan menjadi salah satu kendala dalam penerbitan izin bangunan bagi masyarakat, hal ini perlu adanya percepatan pelepasan Kawasan.
- d. Daya dukung anggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana layanan belum optimal
- e. Masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, dikarenakan jauhnya jarak tempuh ke tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi

**Kata Pengantari**

**Ikhtisar Eksekutifii**

**Daftar Isiii**

**Daftar Tabeliv**

**Daftar Gambarv**

**BAB I Pendahuluan1**

1.1 Latar Belakang2

1.2 Data Umum2

1.3 Aspek Strategis7

1.4 Permasalahan Utama9

1.5 Landasan Hukum10

1.6 Sistematika Penyajian10

**BAB II Perencanaan Kinerja12**

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama12

2.2 Indikator Kinerja Utama16

2.3 Rencana Kinerja Tahunan17

2.4 Perjanjian Kinerja18

**BAB III Akuntabilitas Kinerja23**

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama23

3.2 Analisis Capaian Kinerja24

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional31

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya31

3.5 Realisasi Keuangan35

**BAB IV Penutup42**

**Lampiran-Lampiran**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel: 1.1 Peta Jabatan Kecamatan Kotawaringin Lama<sup>2</sup>
- Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022<sup>5</sup>
- Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022<sup>6</sup>
- Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022<sup>6</sup>
- Tabel: 1.5. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran<sup>8</sup>
- Tabel: 2.1 Sasaran Strategis 2017-2022<sup>13</sup>
- Tabel: 2.2 Sasaran Strategis 2019-2022<sup>14</sup>
- Tabel: 2.3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2019 -  
2022<sup>15</sup>
- Tabel: 2.4 Indikator Kinerja Utama<sup>16</sup>
- Tabel: 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022<sup>17</sup>
- Tabel: 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022<sup>18</sup>
- Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan  
Capaian Kinerja Tahun 2022<sup>19</sup>
- Tabel: 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022<sup>21</sup>
- Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah<sup>23</sup>
- Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022<sup>24</sup>
- Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022<sup>25</sup>
- Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022  
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir<sup>25</sup>
- Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan  
Target Jangka Menengah Renstra 26
- Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022<sup>32</sup>
- Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral<sup>35</sup>
- Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022<sup>36</sup>
- Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022<sup>36</sup>

**DAFTAR GAMBAR**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.



## 1.2 Data Umum

Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian tugas otonomi daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan Kotawaringin Lama mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta instansi vertikal maupun horisontal.
- b. Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta instansi vertikal maupun horisontal.
- c. Mensimplikasikan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta instansi vertikal maupun horisontal.
- d. Mengsinkronisasikan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta instansi vertikal maupun horisontal.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Kecamatan Kotawaringin Lama

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Camat 2. Sekretaris 1) Subbag Umum, Kepegawaian & Perlengkapan 2) Subbag Keuangan, Perencanaan,	1. Dibawah Subbag Umum, Kepegawaian & Perlengkapan 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Kepegawaian 3) Pengelola Barang Milik Negara 4) Pengadministrasi Persuratan	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
<p>Pelaporan dan Pengendalian Program</p> <p>3. Kasi Pelayanan Umum</p> <p>4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>5. Kasi Tata Pemerintahan</p> <p>6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>7. Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>2. Dibawah Subbag Keuangan, Perencanaan, Pelaporan dan Pengendalian Program</p> <p>1) Bendahara</p> <p>2) Verifikator Keuangan</p> <p>3) Pengelola Keuangan</p> <p>4) Pengadministrasi Keuangan</p> <p>5) Pengolah Data Perencanaan Penganggaran</p> <p>3. Dibawah Kasi Pelayanan Umum</p> <p>1) Pengadministrasi Perizinan</p> <p>2) Pengolah Data Pelayanan</p> <p>3) Pengadministrasi Umum</p> <p>4. Dibawah Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1) Pengelola Keamanan dan Ketertiban</p> <p>2) Pengelola Data Kemanan dan Ketertiban</p> <p>3) Pengadministrasi Umum</p> <p>5. Dibawah Kasi Tata Pemerintahan</p> <p>1) Pengelola Adminitrasi Pemerintahan</p> <p>2) Pengadminitrasi Pemerintahan</p> <p>3) Pengadminitrasi Umum</p> <p>6. Dibawah Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>1) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan</p> <p>2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa</p> <p>3) Pengadministrasi Umum</p> <p>7. Dibawah Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>1) Pengadministrasi Umum</p> <p>2) Pengelola Kesejahteraan Sosial</p> <p>3) Pengelola Data</p>	

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
8. Lurah 9. Sekretaris 10. Kasi tata pemerintahan 11. Kasi pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum 12. Kasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat	8. Dibawah sekretaris 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengadministrasi Kepegawaian 3) Pengadministrasi Keuangan 9. Dibawah Kasi tata pemerintahan 1) Pengadministrasi Pemerintahan 2) Pengadministrasi Umum 10. Kasi Pelayanan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Pengelola Keamanan dan Ketertiban 2) Pengadministrasi Umum 11. Kasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. 1) Pengelola Kesejahteraan Sosial 2) Pengadministrasi Umum	1.

*Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020*

Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan dan Kelurahan disusun berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Struktur organisasi kecamatan di atur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 73 tahun 2016 sedangkan Struktur organisasi kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 74 tahun 2016, nomenklatur Kecamatan Kotawaringin Lama mengalami perubahan sebanyak satu kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sedangkan nomenklatur Kelurahan mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ

Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dinas Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 55 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1			1				1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator		1			1				1	
	2. Pengawas		10	7		14	3			17	
	3. Pelaksana		26	10		2		11	1	12	24
C	Jabatan Fungsional										
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>17</b>		<b>18</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>24</b>

Sumber: Data Pegawai Kecamatan Kotawaringin Lama Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Verifikator Keuangan	1	0	1
	Pengelola Keuangan	1	0	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
	Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
	Pengadministrasi Persuratan			
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	0	1
Kasi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	0	1
	Pengelola Data	1	0	1
	Auditor			
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	8	327.915.000
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	7	280.926.000
		Alat-alat Angkut	18	2.127.794.173

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	8	2.9750.000
		Alat Pertanian	21	17.000.000
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	100	1.161.199.667,67
		Alat Studio Komunikasi	20	84.744.000
		Alat Kedokteran dan Kesehatan	30	15.650.000
		Alat Laboratorium	2	27.250.000
		Alat Komputer	100	605.258.500
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	33	10.606.085.728,74
		Tugu titik Kontrol/ Pasti	6	836.902.800
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan dan Jembatan	2	213.700.000
		Bangunan Air	2	92.621.000
		Instalasi Listrik dan Telp	4	181.045.200
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	44	4.180.000
		Barang Bercorak Kesenian	5	16.500.000
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	-	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
			Jumlah	16.628.522.069

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

### 1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

1. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi.
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki kecamatan masih sangat terbatas.
3. Keterbatasan jaringan internet perkantoran.
4. Sebagian wilayah di Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan Kawasan Hutan.

5. Daya dukung anggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas.
6. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan belum optimal
7. Masyarakat kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan.
8. Keterbatasan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa

Tabel 1.5. Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

		KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Internal		Pemahaman terhadap TUPOKSI	Penguasaan Teknologi Informasi
Faktor Eksternal		Pemahaman terhadap Peraturan Daerah	Ketersediaan Sarana Prasarana
			Pembinaan dan Pengawasan
PELUANG	Tersedianya payung hukum penunjang pelayanan	<u>Alternatif Strategi:</u> meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan Sumber Daya Aparatur	<u>Alternatif Strategi:</u> meningkatkan penguasaan Teknologi Informasi aparatur melalui adanya dukungan instansi terkait
	Program Kegiatan		
	Sumber Daya aparatur		
ANCAMAN	Keterbatasan Anggaran	<u>Alternatif Strategi:</u> memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor	<u>Alternatif Strategi:</u> Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa melalui Program Kegiatan Evaluasi dan Monitoring
	Letak Geografis		
	Kejelasan Prosedur		
	Koordinasi Lintas Sektor		

Dari hasil Analisis SWOT teridentifikasi beberapa alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu – isu strategis. Berbagai alternatif strategi dari hasil analisa SWOT dipetakan (strataegy mapping) agar secara seimbang melintasi lebih kurang 4 (empat) perspektif :

1. Strategi SO

Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor
2. Strategi ST
- Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman
- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor
3. Strategi WO
- Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang
- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .
4. Strategi WT
- Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman
- Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

### 1.4 Permasalahan Utama

Kecamatan Kotawaringin Lama merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian tugas otonomi daerah. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Kotawaringin Lama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi, sementara ketersediaan sumber daya, khususnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki kecamatan masih sangat terbatas,



- b. Ketersediaan jaringan internet perkantoran sampai saat ini belum stabil karena masih menggunakan pemancar radio, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.
- c. Status Kawasan Hutan menjadi salah satu kendala dalam penerbitan izin bangunan bagi masyarakat, hal ini perlu adanya percepatan pelepasan Kawasan.
- d. Daya dukung anggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana layanan belum optimal
- e. Masyarakat masih kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, dikarenakan jauhnya jarak tempuh ke tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

### 1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

### 1.6 Sistematis Penyajian

Laporan Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

### Kata Pengantar

- i. Ikhtisar Eksekutif
- ii. Daftar isi
- iii. Daftar Tabel

### Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Data Umum
- 1.3 Aspek Strategis
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Landasan Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

### Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

### Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan

### Lampiran-lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis Kecamatan Kotawaringin Lama

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

- I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
- K = KETAKWAAN,
- H = HARMONIS,
- L = LANGGENG,
- A = AMAN,
- S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

- N = NASIONALIS,
- U = UNGGUL,
- R = RELIGIUS,
- A = AMANAH,
- N = NYATA,
- I = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah misi yang **pertama** yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”**

Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022. Sebagaimana table terlampir.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis 2017-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum di kecamatan	N/A	80	85	85	90	90
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Ketercukupan Administrasi Perkantoran	80	80	80	90	90	90

Sumber : Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2017-2022

Namun berdasarkan hasil evaluasi sakip oleh kemenpan RB tanggal 13 agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan.

**Tujuan dan Sasaran**

Seusai dengan Perubahan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 2 (dua) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahunan				Target Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	
	Meningkatkan Kualitas layanan publik pada Kantor Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	95	96	99	99
			Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan		> 50	> 60	> 60	> 60
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	75	75	90	90	90
		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	80	90	90	90	90
		Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	C	B	B	B	B

Sumber: Perubahan Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2019-2022

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.4 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) setiap tahun	Camat	Dokumen IKM
	Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Kelurahan	Lurah	Dokumen IPK
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Hasil rekomendasi kegiatan monitoring/ pembinaan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi yang disampaikan kepada desa/kelurahan dikali 100%	Seluruh Kasi Kecamatan	Laporan Kegiatan

Sumber: SK Kecamatan Kotawaringin Lama No 17 Tahun 2019

## 2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata

untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kotawaringin Lama Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	> 60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90 %

Sumber: Data Diolah

#### 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kecamatan Kotawaringin

Lama Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	> 60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	90 %

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik</b>			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	24.935.000	17.385.000	(7.550.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	24.935.000	17.385.000	(7.550.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19.960.000	12.410.000	(7.550.000)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.975.000	4.975.000	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	779.272.000	940.000.000	160.728.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kotawaringin Hulu	387.045.000	502.500.000	115.455.000



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	177.678.640	280.178.640	102.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	209.366.360	222.321.360	12.955.000
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kotawaringin Hilir	392.227.000	437.500.000	45.273.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	246.591.632	284.091.632	37.500.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	145.635.368	153.408.368	7.773.000
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan</b>				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		104.757.400	93.657.900	(11.099.500)
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	104.757.400	93.657.900	(11.099.500)
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.999.500	4.999.500	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.999.700	14.999.700	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.999.500	8.839.500	3.840.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.999.500	4.999.500	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.770.000	15.590.000	(4.180.000)
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	34.990.000	28.270.000	(6.720.000)
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.999.500	960.000	(4.039.500)
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.999.700	14.999.700	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.000.000	21.000.000	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.000.000	21.000.000	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.000.000	6.000.000	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.000.000	6.000.000	-
<b>Sasaran 4 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.290.000	12.290.000	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.060.000	9.060.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.230.000	3.230.000	-

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel: 2.8 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>Sasaran 3 : Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi</b>			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.160.479.200	10.723.548.200	563.069.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.616.004.600	3.757.660.000	141.655.400
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.563.104.600	3.703.114.000	140.009.400
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	13.750.000	13.750.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.150.000	40.796.000	1.646.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.338.000	75.350.000	(988.000)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.200.000	28.200.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.138.000	47.150.000	(988.000)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.182.371	216.634.178	37.451.807
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.379.141	18.379.141	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.419.300	45.657.107	3.237.807
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.253.930	18.253.930	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.130.000	134.326.000	34.196.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.927.940	458.352.511	47.424.571
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.500.000	174.774.759	18.274.759
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.452.940	147.452.940	80.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.975.000	136.124.812	(50.850.188)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.522.792	683.215.714	66.692.922
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.317.500	93.420.741	22.103.241
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.205.292	589.794.973	44.589.681
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.263.897	170.570.697	(10.693.200)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.086.000	123.077.000	(9.000)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.174.200	19.490.000	(10.684.200)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.003.697	28.003.697	-
<b>Sasaran 4 : Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah</b>				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.290.000	12.290.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.060.000	9.060.000	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.230.000	3.230.000	-

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

#### 3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama

Pada tahun 2022, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	99	90,81	91,73	Sangat Tinggi
		Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Nilai Indeks Pembangunan Kelurahan	> 60	77,46	110,66	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Persentase	100 %	100 %	100	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah

### 3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan Capaian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama dapat jelaskan sebagai berikut :

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator sasaran dan indicator kinerja yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	99	90,81	Tidak Tercapai
2	Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	Nilai Indeks Pembangunan Kelurahan	>60	77,46	Tercapai
3	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	Persentase	100 %	100 %	Tercapai

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut jika dibandingkan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja (%)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	76	80	80,69	89	90,81	N/A	95,00	94,12	94,93	92,71	91,73
Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan			75,26	75,89	76,01	77,46			150,52	126,48	108,58	110,65
Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra

Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra						Realisasi Kinerja sd Tahun 2022					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	85	85	96	99	N/A	76	80	80,69	89	90,81
Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan		50	60	60	60	60			75,26	75,89	76,01	77,46
Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat “**Tercapai**”.

**1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik**

**Indikator 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat**

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020, telah menetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai **99**, namun dalam pelaksanaannya belum bisa mencapai target dengan capaian nilai **90,81** dengan capaian 91,73 %. Capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Target tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan pengajuan Dokumen Perizinan secara Online



2. Terkendalanya perizinan dikarenakan lokasi pengajuan di wilayah HP/HPK sehingga menghambat proses layanan.
3. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan SOP layanan Kecamatan sehingga pelayanan urusan dokumen terkesan dipersulit.

Program / Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Sosialisasi dan Pendampingan kepada masyarakat untuk mendapatkan dokumen perizinan, hal ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan bertemu masyarakat untuk memberikan sosialisasi terkait perizinan dan juga mendatangkan petugas dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melaksanakan Pelayanan Perizinan di Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama.

Selanjutnya Strategi yang telah dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan layanan di Kecamatan Kotawaringin Lama adalah :

1. Melakukan Kerja Sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk melakukan layanan perizinan di Kecamatan.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait yang menangani pelepasan wilayah hutan.
3. Melakukan sosialisasi secara aktif terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat, melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Menggunakan Aplikasi Survei yang disediakan

oleh Pemerintah Daerah :



### **Indikator 2 : Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan**

Selanjutnya target Indeks Pembangunan Kelurahan tahun 2022 yaitu 60 dengan predikat Kelurahan Berkembang, pada tahun 2022 rata-rata capaian IPK dari 2 (dua) kelurahan adalah 77,461106, Capaian tersebut secara terperinci sebagai berikut :

- a. Nilai Indeks Pembangunan Kelurahan Kotawaringin Hilir pada tahun 2022 yaitu 76,648658 capaian tersebut melebihi target yang telah ditentukan, Kelurahan Kotawaringin Hilir memperoleh predikat Kelurahan Mandiri, yakni Kelurahan yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Predikat Kelurahan Mandiri merupakan kelurahan dengan nilai IPK lebih dari 75 (IPK Mandiri > 75,00)
- b. Capaian Indeks Pembangunan Kelurahan Kotawaringin Hulu dengan nilai 78,273554 dengan demikian Kelurahan Kotawaringin Hulu juga memenuhi target dengan predikat Kelurahan Mandiri, yakni Kelurahan yang telah memenuhi aspek kebutuhan sosial dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan.

Target tersebut tercapai, dengan mengoptimalkan seluruh Sumber Daya di Kelurahan, terutama menciptakan kerjasama yang baik antara aparatur pemerintahan dan Masyarakat, maupun lembaga-lembaga di Kelurahan. Selain itu dukungan pendanaan terhadap kelurahan berupa Dana Kelurahan dapat dipergunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## **2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan**

**Indikator : Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi**

Selain sasaran di RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022, Kecamatan juga mempunyai sasaran pada Rencana Strategis (RENSTRA) yaitu **Meningkatkan pembinaan dan peyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman dan Ketertiban umum dengan indikator Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi** dengan target 100 % dan capaian sebesar 100 %. Target tersebut terlampaui dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut :

- Persentase pemerintahan desa yang tertib administrasi memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh kerja sama antar seksi yang ada di Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembinaan/ fasilitasi ke desa-desa bisa terlaksana secara efektif dan efisien.
- Dukungan dan kerjasama yang baik dari 15 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan Kotawaringin Lama

Secara terperinci capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Pencapaian Target Indikator Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang tertib administrasi didukung oleh :

1. Pembinaan Tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan indikator kegiatan sebagai berikut :

- Target penyelesaian tata batas desa pada tahun 2022 sebanyak 2 desa tercapai 100% yaitu Desa Lalang dan Sumber Mukti yang dibuktikan dengan penerbitan SK Bupati Kotawaringin Barat tentang penetapan Batas Desa.
  - Jumlah desa/Kelurahan di Kotawaringin Lama sebanyak 17 desa/kelurahan dan seluruhnya telah melaporkan administrasi kependudukan tepat waktu.
  - Jumlah Desa yang dibina perangkat desa dan BPD dengan target 15 Desa, tercapai 15 Desa
  - Penyelesaian permasalahan sengketa lahan sebanyak 3 Kasus yaitu di Desa Babual, Desa Kinjil dan Kelurahan Kotawaringin Hilir, dengan capaian 2 permasalahan telah diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan 1 permasalahan masih dalam tahap mediasi.
2. Pembinaan dan Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan dengan indikator kegiatan sebagai berikut :
- Seluruh Desa/Kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu.
  - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan.
  - Pelaksanaan monitoring hasil pembangunan, keuangan dan aset desa yang dilakukan di 15 desa, sesuai jadwal monitoring.
  - Sebanyak 2 (dua) desa/ kelurahan yang mengikuti lomba desa/kelurahan dan seluruhnya telah difasilitasi.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban dengan indikator kegiatan sebagai berikut :
- Jumlah anggota satlinmas, satlak dan satgas bencana yang dibina dan difasilitasi dengan target 50 Orang tercapai 50 Orang
  - Sebanyak 15 (lima belas) desa dan 2 (dua) kelurahan melaksanakan kegiatan siskamling sebagaimana target yang telah ditetapkan.
  - Pada tahun 2022 tidak ada kejadian kebakaran lahan dan hutan, sehingga tidak ada progress kegiatan dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan, namun terjadi bencana banjir di 3 (tiga)

desa dan 2 (dua) kelurahan dan telah ditangani bersama dalam bentuk pendirian posko siaga bencana, distribusi bantuan sosial dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

4. Pembinaan kesejahteraan rakyat dengan indikator kegiatan sebagai berikut :
  - Jumlah Kader PKK Kecamatan/Kelurahan yang di fasilitasi dengan target 17 kegiatan, tercapai sebanyak 17 kegiatan
  - Jumlah fasilitasi bidang keagamaan dengan target 17 kegiatan tercapai 36 kegiatan, hal ini disebabkan menyesuaikan dengan jumlah rumah ibadah yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pada tahun 2022
  - Jumlah fasilitasi bidang kesehatan dengan target 17 kegiatan, tercapai sebanyak 17 kegiatan
  - Jumlah fasilitasi bidang wawasan kebangsaan dengan target 17 Kegiatan, tercapai sebanyak 17 kegiatan

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja SKPD tidak ada yang dapat disandingkan dengan target/standar nasional.

### 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran I

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel: 3.6 Efisiensi Anggaran 2022**

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Anggaran			Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan	> 70	77,46	100	940.000.000	928.396.320	98,77	1,23
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi	100 %	100 %	100	120.657.900	117.615.900	97,48	2,52
Total efisiensi anggaran					6.452.116.000	6.346.979.325	98,37	1,63

Sumber: Data diolah

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena:

1. Capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Desa/Kelurahan mengalami efisiensi terhadap penggunaan anggaran dan capaian target kinerja. Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran pendukung target kinerja, dimana realisasi capaian kinerja Indeks Pembangunan Desa/kelurahan sebesar 100 % dengan penggunaan anggaran sebesar 98,77 % dari anggaran yang tersedia.
2. Capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi mengalami efisiensi terhadap penggunaan anggaran, dimana untuk mencapai target kinerja 100 % dapat dilakukan efisiensi anggaran sebesar 2,52 %. Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran

pendukung target kinerja, dimana realisasi capaian kinerja terhadap Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang tertib administrasi sebesar 100 % dengan penggunaan anggaran sebesar 97,48% dari anggaran yang tersedia.

Selain dari sisi anggaran, Kecamatan Kotawaringin Lama juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.7 Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lian		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Monitoring dan Evaluasi	Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja Pemerintahan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Hasil Monev	Mendukung pencapaian target kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan
		BPMD	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa terhadap penggunaan dana desa	Hasil monev dan rekonsiliasi penggunaan dana desa	
2	Pendampingan penyusunan laporan	Inspektorat	Pendampingan terhadap penyusunan laporan SAKIP SKPD	Laporan SAKIP	Mendukung pencapaian nilai SAKIP SKPD
		BPKAD	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	

Sumber: Data diolah

### 3.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp 6.028.494.000 pada anggaran murni dan

setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp 6.452.116.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp 6.346.979.325 atau sebesar 98,37%. Data anggaran dan realisasi DPPA Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:



Tabel: 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional			
	- Belanja Pegawai	3.703.114.000	3.659.843.175	98,83
	- Belanja Barang/Jasa	1.993.930.597	1.937.416.850	97,17
2	Belanja Modal			
	- Belanja Peralatan & Mesin	337.577.911	333.381.500	98,76
	- Belanja Gedung & Bangunan	417.493.492	416.337.800	99,72
	- Belanja Jalan dan Irigasi			
	- Belanja Aset Tetap Lainnya			
	<b>TOTAL</b>	<b>6.452.116.000</b>	<b>6.346.979.325</b>	<b>98,37</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kotawaringin Lama 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEG	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.374.073.100	5.285.411.105	98,35
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.290.000	12.187.000	99,16
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	9.060.000	8.981.000	99,13

**KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

<b>URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.230.000	3.206.000	99,26
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.757.660.000</b>	<b>3.713.261.646</b>	<b>98,82</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.703.114.000	3.659.843.175	98,83
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.750.000	13.750.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	40.796.000	39.668.471	97,24
Administrasi Kepegawaian Daerah	75.350.000	74.310.651	98,62
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.200.000	28.200.000	100
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	47.150.000	46.110.651	97,80
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>216.634.178</b>	<b>216.095.882</b>	<b>99,75</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.379.141	18.375.500	99,98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.675.107	45.653.500	99,95
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	18.253.930	18.247.500	99,96
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD	134.326.000	133.819.382	99,62
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>458.352.511</b>	<b>455.961.800</b>	<b>99,48</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	174.774.759	172.954.000	98,96

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.452.940	147.167.800	99,81
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.124.812	135.840.000	99,79
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	683.215.714	650.732.550	95,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.420.741	70.891.334	75,88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589.794.973	579.841.216	98,31
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	170.570.697	162.861.576	95,48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.077.000	115.521.576	93,86
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	19.490.000	19.490.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.003.697	27.850.000	99,45
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	17.385.000	15.556.000,00	89,48
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	17.385.000	15.556.000	89,48

**KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

<b>URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.410.000	11.910.000	95,97
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	4.975.000	3.646.000	73,29
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>967.000.000</b>	<b>954.746.320,00</b>	<b>98,73</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.000.000	20.350.000	96,90
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	21.000.000	20.350.000	96,90
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.000.000	6.000.000	100,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.000.000	6.000.000	100,00
<b>KELURAHAN KOTAWARINGIN HILIR</b>	<b>437.500.000</b>	<b>430.722.320</b>	<b>98,45</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	437.500.000	430.722.320	98,45
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	284.091.632	279.110.000	98,25
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.408.368	151.612.320	98,83
<b>KELURAHAN KOTAWARINGIN HULU</b>	<b>502.500.000</b>	<b>497.674.000</b>	<b>99,04</b>
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	502.500.000	497.674.000	99,04

**KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280.178.640	279.152.500	99,63
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	222.321.360	218.521.500	98,29
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>93.657.900</b>	<b>91.265.900,00</b>	<b>97,45</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93.657.900	91.265.900	97,45
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.999.500	4.413.500	88,28
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.999.700	14.815.700	98,77
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah	8.839.500	8.679.500	98,19
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.999.500	4.943.500	98,88
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.590.000	15.156.000	97,22
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.270.000	27.650.000	97,81
Fasilitasi Penataan , Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	960.000	876.000	91,25
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.999.700	14.731.700	98,21

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEG	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Anggaran (Rp.)
<b>TOTAL</b>	6.452.116.000	6.346.979.325,00	98,37

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Kotawaringin Lama 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 98,37% yang berarti masuk dalam kategori capaian "Sangat Tinggi".

**Instrumen Pendukung Capaian Kinerja**

1. Pencapaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SKM Pemerintah Daerah.



2. Nilai Indeks Pembangunan Kelurahan diperoleh dari perhitungan scoring ketersediaan fasilitas di kelurahan, pemberdayaan kelurahan dan ketersediaan komponen pendukung yang tersedia layanan masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan.

**INDEKS PEMBANGUNAN KELURAHAN**

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Penimbang	Kode Skor	Keterangan Skor	Skor	Nilai	Data Dukung
1	PELAYANAN DASAR	Pelayanan Pendidikan	1 Ketersediaan dan Akses ke TK/RA/BA	0,0227852	Kode 0	merupakan kondisi dimana kelurahan tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 20 km		Kode x (dikali penimbang	a. TK/RA/RB Negeri dan Swasta  b. Jika tidak ada, perkiraan jarak terdekat ke TK/RA/BA.  c. Jumlah Penduduk (L+P).
					Kode 1	merupakan kondisi dimana kelurahan tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 10 km dan kurang dari 20 km.		0,0227852	
					Kode 2	merupakan kondisi dimana kelurahan tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA kurang dari 10 km.			
					Kode 3	merupakan kondisi dimana di kelurahan tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk kelurahan kurang dari 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).			
					Kode 4	merupakan kondisi dimana di kelurahan tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk kelurahan lebih dari atau sama dengan 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).			

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Penimbang	Kode Skor	Keterangan Skor	Skor	Nilai	Data Dukung
					Kode 5	merupakan kelurahan yang mempunyai kepala kelurahan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah akademi/DIII hingga S3.			
			42 Kualitas SDM Sekretaris Kelurahan	0,0279371	Kode 0	merupakan kelurahan yang tidak mempunyai sekretaris kelurahan.			a.Keberadaan sekretaris kelurahan
					Kode 1	merupakan kelurahan yang mempunyai sekretaris kelurahan dengan pendidikan tertinggi tidak tamat SD sederajat atau tidak pernah sekolah.			b.Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sekretaris kelurahan
					Kode 2	merupakan kelurahan yang mempunyai sekretaris kelurahan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SD sederajat atau SMP sederajat.			
					Kode 3	merupakan kelurahan yang mempunyai sekretaris kelurahan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah SMA sederajat.			
					Kode 4	merupakan kelurahan yang mempunyai sekretaris kelurahan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah Akademi/DIII.		0,1117484	
					Kode 5	merupakan kelurahan yang mempunyai sekretaris kelurahan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya adalah Diploma IV/S1 hingga S3.			
							<b>IPK</b>	<b>77,461106</b>	

No	Dimensi	Variabel	Indikator	Penimbang	Kode Skor	Keterangan Skor	Skor	Nilai	Data Dukung
----	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	------	-------	-------------

**KETERANGAN NILAI IPK (INDEKS PEMBANGUNAN KELURAHAN )**

- 1. Kelurahan Tertinggal** Kelurahan yang belum terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kelurahan Tertinggal adalah kelurahan dengan nilai IPK kurang dari sama dengan 50 ( IPK Tertinggal ≤50,00).
- 2. Kelurahan Berkembang** Kelurahan yang sudah terpenuhi SPM namun secara pengelolaan belum menunjukkan keberlanjutan. Kelurahan Berkembang merupakan kelurahan dengan nilai IPK. Kelurahan Berkembang adalah kelurahan dengan nilai IPK lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75 (50,00 < IPK Berkembang ≤ 75,00)
- 3. Kelurahan Mandiri** Kelurahan yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjutan. Kelurahan Mandiri merupakan kelurahan dengan nilai IPD lebih dari 75 (IPK Mandiri > 75,00)



## BAB IV PENUTUP

Hasil laporan kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 100,79 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.
2. Capaian kinerja keuangan 98,37 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.346.979.325 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi, sementara ketersediaan sumber daya, khususnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki kecamatan masih sangat terbatas,
2. Ketersediaan jaringan internet perkantoran sampai saat ini belum stabil karena masih menggunakan pemancar radio, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien.
3. Status Kawasan Hutan menjadi salah satu kendala dalam penerbitan izin bangunan bagi masyarakat, hal ini perlu adanya percepatan pelepasan Kawasan.
4. Daya dukung anggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik masih terbatas, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana layanan belum optimal.
5. Masyarakat kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, hal ini dikarenakan jarak tempuh ke tempat Pelayanan Administrasi Kependudukan cukup jauh dan memerlukan biaya yang tinggi.

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Kecamatan Kotawaringin Lama berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan, melalui upaya:
  - a. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi digital.
  - b. Mengevaluasi kinerja pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.
2. Memenuhi sarana dan prasarana perkantoran, melalui upaya:
  - a. Mendorong percepatan pembangunan jaringan internet di lingkungan Kantor Kecamatan dan seluruh Desa di Kecamatan Kotawaringin Lama melalui dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - b. Membangun aplikasi layanan berbasis aplikasi digital online.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kotawaringin barat, melalui upaya :
  - a. Inventarisir lahan pemukiman dan kebun masyarakat yang masuk dalam Kawasan hutan.
  - b. Mengajukan pelepasan kawasan hutan melalui program pemerintah.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
5. Mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 21 Februari 2023

CAMAT KOTAWARINGIN LAMA,

NAH WANI, S.IP

NIP. 19660306 198712 1 004





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**